# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Pembangunan merupakan proses perubahan dalam segi kehidupan masyarakat menuju kearah yang lebih baik sehingga tercipta suatu masyarakat yang semakin modern. Meningkatnya pembangunan di suatu Negara ditandai oleh pesatnya perkembangan ekonomi, sehingga muncul tuntutan masyarakat terhadap pelayanan umum yang harus dilakukan oleh pemerintah berkaitan dengan sarana dan prasarana. Pembangunan adalah kegiatan yang berkesinambungan dengan tujuan utama adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan dapat dilaksanakan dengan lancar apabila ada sumber dana yang mendukung. Seiring dengan perkembangan zaman yang lebih maju, maka pembangunan harus disertai dengan pertumbuhan perekonomian yang lebih maju juga. Pengelolaan APBN yang berimbang dan dinamis, mengkondisikan bahwa pengeluaran yang dibelanjakan harus sesuai dengan adanya penurunan penerimaan negara dari sektor migas. Salah satunya adalah penerimaan dari sektor pajak. Sektor pajak merupakan pilihan yang tepat karena jumlahnya relatif stabil dan dapat dijadikan sebagai *instrument* untuk memacu partisipasi masyarakat serta mendistribusikan pembangunan.

Fenomena pajak yang saat ini terjadi, dan menjadi pusat perhatian publik adalah merupakan suatu gambaran serta bukti betapa buruknya pengawasan terhadap sistem perpajakan di negara kita ini. Berkat pernyataan salah satu orang yang bisa

dibilang memiliki jabatan tinggi di jajaran Kepolisian Republik Indonesia adalah Susno Duadji, dialah yang membeberkan beberapa nama yang turut juga menikmati hasil haram tersebut. Salah satu dari nama itu ialah yang bernama Gayus Tambunan, ia diduga menyelundupkan dana pajak sebesar kurang lebih 28 miliar rupiah dan juga sekaligus merugikan penerimaan negara terutama dari sektor pajak. Menurut APBN sumber pendapatan terbanyak didapat dari sektor perpajakan meskipun masih banyak sektor lain seperti minyak dan gas bumi, serta bantuan luar negeri. Hal ini bisa dibuktikan saat negara kita dilanda krisis berkepanjangan sampai saat inipun masih diragukan apakah negara kita bisa menumbuhkan keadaan perekonomian, sektor pajak masih tetap memiliki nilai besar bahkan mengalami kenaikan serta menembus sampai pada prosentase terbesar dari sektor non migas.

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) merupakan Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dalam pembayaran lain dengan bentuk dan nama apa pun. Sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Hampir 33 tahun sejak diundangkannya PP No. 32/1979 tidak ada perubahan Batas Usia Pensiun (BUP) PNS pada usia 56 tahun. Padahal dalam kurun waktu tersebut tentu ada perubahan terutama dengan kesehatan dan harapan hidup orang Indonesia yang meningkat. Usia harapan hidup pada saat ini diperkirakan sudah menjadi 67,8 tahun sedang pada tahun 1980 hanya mencapai 54,4 tahun. Selain itu terdapat kesenjangan baik sesama PNS maupun pegawai negeri lain seperti guru, dokter maupun TNI/Polri. Dengan latar belakang tersebut perpanjangan usia pensiun

menjadi 58 tahun seperti yang diusulkan beberapa waktu lalu, saya kira menjadi hal yang realistis.

Pembangunan merupakan proses perubahan dalam segi kehidupan masyarakat menuju kearah yang lebih baik sehingga tercipta suatu masyarakat yang semakin modern. Meningkatnya pembangunan di suatu Negara ditandai oleh pesatnya perkembangan ekonomi, sehingga muncul tuntutan masyarakat terhadap pelayanan umum yang harus dilakukan oleh pemerintah berkaitan dengan sarana dan prasarana.

Untuk kemajuan tersebut diperlukan suatu sarana yang dapat menunjang aktivitas masyarakat disegala bidang, untuk itu diperlukan biaya darimana biaya tersebut berasal. Tentu saja, negara kita memperoleh pendapatan dari sektor migas, export, dan yang paling besar dalam menyumbang pendapatan Negara yaitu dari sektor pajak. Sektor ini juga didukung dengan jumlah penduduk yang besar. Berpotensi dalam menyumbang pajak, baik itu dari pajak perorangan maupun badan. Oleh karena itu, PLN sebagai salah satu BUMN yang paling besar hadir dengan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat dalam kaitannya disegala bidang pajak terutama pajak penghasilan.

Dengan potensi PLN yang sangat besar dan terbesar diseluruh tanah air tentu cukup besar peranannya dalam menyumbang pajak. Pada kesempatan ini penulis melakukan penelitian di PT.PLN (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban (P3B) Jawa Bali Region Jawa Barat. Untuk mengatur agar masalah pajak ini tidak semerawut maka dibentuklah bagian staf kepegawaian yang salah satunya menghitung, memotong, dan melaporkan pajak penghasilan Pasal 21 atas gaji,

sehingga dapat tertata dengan baik dan karyawan dapat meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat karena tidak dibebani pemikiran untuk menyetor pajak.

Dalam Laporan Kerja Praktek ini penulis akan tuangkan laporan dengan judul "**TINJAUAN ATAS PELAKSANAAN PAJAK PPH PASAL 21 PADA PT PLN (PERSERO PENYALURAN DAN PUSAT PENGATUR BEBAN (P3B) JAWA BALI REGION JAWA BARAT".**

## 1.2 Maksud Dan Tujuan Kerja Praktek

### 1.2.1 Maksud Kerja Praktek

Dalam penelitian ini, penulis bermaksud untuk memperoleh data serta Informasi yang berkaitan :

1. Untuk menghitung besarnya PPh Pasal 21 berdasarkan data yang diperoleh dari PT.PLN (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban (P3B) Jawa Bali Region Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui Prosedur penghitungan dan pelaporan pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan pada PT.PLN (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban (P3B) Jawa Bali Region Jawa Barat.

### 1.2.2 Tujuan Kerja Praktek

Ada beberapa Tujuan dari kerja praktek ini yaitu :

1. Untuk membandingkan antara teori dan materi yang dipelajari pada masa kuliah dengan praktek nyata yang terjadi di dalam perusahaan atau instansi pemerintah.

2. Untuk mengetahui apakah perusahaan yang bersangkutan telah melakukan penghitungan atau pemotongan Pajak Penghasilan sesuai dengan UU Perpajakan yang berlaku.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan pada PT.PLN (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban (P3B) Jawa Bali Region Jawa Barat.
4. Sebagai media memberikan pemecahan-pemecahan yang dianggap perlu timbul antara teori dan penerapan penghitungan Pajak Penghasilan.
5. Untuk mengetahui besarnya pajak yang diserahkan perusahaan yang bersangkutan pada pemerintah.

### 1.3 Kegunaan Kerja Praktek

Pada dasarnya kerja praktek merupakan satu implementasi dari teori menjadi praktek. Dari pelaksanaan kerja praktek lapangan ini penulis mengharapkan banyak manfaat dan kegunaan yang dapat diperoleh baik bagi penulis, pihak perusahaan maupun pihak lain yang terkait.

1. Bagi penulis

   Dapat mengetahui secara langsung mengenai bagaimana cara perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 atas gaji pegawai, prosedur pembayaran PPh pasal 21, pengisian SPT PPh pasal 21 dan prosedur pelaporan SPT PPh pasal 21.

2. Bagi Perusahaan/ Instansi (PT PLN (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban (P3B) Jawa Bali Region Jawa Barat) adalah :

a) Sebagai informasi yang berguna sebagai bahan evaluasi untuk membantu menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan Pajak Penghasilan 21 atas gaji karyawan.
b) Dapat membantu menginput PPh Pasal 21 dan memperkenalkan sistem yang dipakai kepada penulis.
c) Sebagai sarana untuk menjalin hubungan kerja dengan lembaga pendidikan yang bersangkutan.

## 1.4 Metode Kerja Praktek

Dalam penulisan laporan, penulis mendapatkan gambaran data tentang kenyataan yang diterima pada saat praktek kerja dengan tujuan untuk mengetahui situasi atau kejadian secara sistematis, mengenai fakta yang diteliti dan dibahas tentang permasalahannya. Metode yang digunakan penulis yaitu *block release* dimana melakukan suatu penelitian dalam waktu tertentu. Dimana waktu dan tempat kerja praktek yang dilakukan penulis yaitu Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek yang dimulai dari tanggal 11 Juli – 12 Agustus 2011.

Agar dapat tersusunnya laporan kuliah praktek kerja ini tentunya sangat memerlukan teknik-teknik pengumpulan data. Adapun teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

### A. *Field Research* (Penelitian Lapangan)

Yaitu kegiatan memperoleh data dengan cara melakukan praktek kerja dilapangan pada objek yang di tunjuk sebagai tempat praktek kerja.

Adapun teknik-teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu sebagai berikut :

1. Observasi, yaitu tehnik pengumpulan data dengan cara pencairan dan pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan dan penelitian mengenai kegiatan-kegiatan yang terjadi pada suatu perusahaan dalam bagian keuangan sub. Bagian akuntansi.
2. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan tatap muka langsung dengan pihak yang bersangkutan untuk diwawancarai sehungga data-data yang diperlukan dapat dimiliki penulis secara langsung pada staf akuntansi yang mengelola bidang aktiva tetap.
3. Dokumentasi, yaitu data yang diperoleh dari hasil kerja praktek yang dilaksanakan dengan cara mencari, mencatat data-data yang diperlukan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Adapun dokumen yang diperoleh yaitu surat edaran PT. PLN mengenai PPh Pasal 21 atas gaji karyawan.

**B. *Library Research* (Studi Pustaka)**

Study Literatur, yaitu tehnik pengumpulan data dari berbagai bahan pustaka (referensi) yang relevan dalam penyusunan Laporan Kuliah Kerja Praktek.

## 1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

### A. Lokasi Kerja Praktek

Dalam penyusunan Kerja Praktek ini, penulis melakukan penelitian di PT PLN (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban (P3B) Jawa Bali Region Jawa Barat. Yang beralamat JL. Moh. Toha KM 4 Komplek PLN GI. Cigereleng Bandung 40255, Telp (022) 5201723 dan Fax (022) 5201742. Sedangkan waktu Kerja Praktek yang dilakukan dalam 1 periode yaitu dari tanggal 11 Juli – 12 Agustus 2011. Hari kerja praktek yang berlaku dari hari Senin – Jum'at dan waktu pelaksanaan kegiatan kerja praktek dimulai pada pukul 07.30 – 16.00 WIB.

### B. Waktu Kerja Praktek

Waktu pelaksanaan kerja praktek dimulai dari tanggal 11 Juli 2011 s/d 12 Agustus 2011.

**Tabel 1.1**

**Aktivitas Kerja Praktek dan Kantor**

| No. | Hari | Waktu | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1. | Senin – Jum'at | 07.30 – 16.00 WIB | Aktivitas Kerja |
| | | 12.00 – 13.00 WIB | Istirahat |
| 2. | Sabtu | - | Libur |

**Tabel 1.2**
**JadwaL Kegiatan Dalam Penulisan Laporan KKP**

| NO | KEGIATAN | BULAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | JULI | | | | AGUSTUS | | | | SEPTEMBER | | | | OKTOBER | | | | NOVEMBER | | | | DESEMBER | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Mengajukan Permohonan KKP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Mencari Tempat KKP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Pelaksanaan KKP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Mengajukan Judul | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Mencari Data KKP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Membuat Lap. KKP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bimbingan Lap. KKP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Judul | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | b. BAB I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | c. BAB II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | d. BAB III | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | e. BAB IV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |